BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendekatan Konstruktivisme

Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang memfokuskan bahwa pengetahuan adalah pemahaman pencapaian (konstruksi) yang di bentuk oleh kita sendiri. Pengetahuan bukan tiruan dari realitas, bukan juga gambaran dari dunia kenyataan yang ada. Pengetahuan merupakan hasil dari konstruksi rasional maupun intelektual melalui kegiatan seseorang dengan membuat struktur, kategori, konsep, dan skema yang diperlukan untuk membentuk pengetahuan tersebut. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir (filosofi) pembelajaran konstektual yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Pengetahuan bukanlah kumpulan fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkontruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata.

Perspektif Konstruktivisme awalnya merupakan salah satu perspektif yang dikembangkan dan digunakan dalam studi Sosiologi. Setidaknya sejak abad ke delapan belas, tulisan tentang perspektif ini telah ditemukan. Giambattista Vico adalah salah satu ilmuan yang dapat ditunjuk memiliki kontribusi pada perkembangan Konstruktivisme. Selanjutnya, Konstruktivisme sebagai perspektif yang dikembangkan dalam studi Hubungan Internasional (HI) sesungguhnya

berada dalam sebuah ”keranjang” besar bernama Post Modernisme bersama perspektif Kritis, Post Kolonialisme dan Feminimisme. Konstruktivisme sebagaimana perspektif Post Modernisme lainnya ditransformasikan oleh para ilmuan HI sebagai alat analisis dalam studi ini salah satunya disebabkan oleh keidakpuasan sebagian para ilmuan HI dalam menerima penjelasan perspektif arus utama dalam studi HI. Perspektif Realis, Liberalis maupun Strukturalis diangap oleh para ilmuan pendukung Kontruktivisme terlalu mengagung-agungkan *power* sebagai basis analisis, sehingga alih - alih berkontribusi pada terciptanya dunia damai, asumsi *power* yang terkandung dalam asumsi perspektif arus utama justru acapkali mempengaruhi tingkah laku para pelaku hubungan internasional untuk menjadi lebih agresif dan bersifat konfliktual. Istilah *constructivism* (yang dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konstruksivisme) berasal dari kata kerja Inggris *"to construct"*. Kata ini merupakan serapan dari bahasa Latin *"con struere"* yang berarti menyusun atau membuat struktur. Konsep inti konstruktivisme dengan demikian adalah proses penstrukturan atau pengorganisasian (Mahoney,2003;4).

Dengan kata lain Konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi (bentukan) manusia itu sendiri. Manusia menkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman dan lingkungan mereka. Suatu pengetahuan dianggap benar bila pengetahuan itu dapat berguna untuk menghadapi dan memecahkan persoalan yang sesuai (Suparno, 2008:28).Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Adapun dalam buku

lain dikatakan, konstruktivisme merupakan satu diantara paham yang menyatakan bahwa positivism dan postpositivisme merupakan paham yang keliru dalam mengungkapkn realitas dunia. Karena pandangan ini cenderung menolak generalisasi terhadap suatu realitas. Maka dapat dikatakan konstruktivism merupakan lawan dari positivisme dan postpositivisme (Adib,2010.124).

Dengan demikian dapat di simpulkan yaitu konstruktivisme adalah sebagai salah satu falsafah modern yang mendefiniskan bahwa pengetahuan merupakan hasil proses interaksi dan pembangunan yang dibuat dari manusia itu sendiri dan mempunyai ciri khas bermacam - -macam, beraneka bentuk dan jenis yang mana sangat sulit untuk diklasifikasi maupun disamaratakan (pukul rata), Sehingga pengertian maupun penjelasan yang diberikan dan didapatkan seseorang atau makna yaitu hasil dari proses yang dibangun secara sadar dari apa yang ditemukan, di telaah, diamati, dan di tinjau oleh orang tersebut untuk dipakai sebagai pedoman dan hasil yang terjadi unik dan tidak bisa di pukul rata untuk semua orang.

2.1.1 Hubungan Internasional

Manusia dan dunia sosialnya tidak sesederhana objek-objek penelitian lain yang hanya merespon rangsangan-rangsangan fisikal. Manusia mampu menentukan untuk mengambil jarak atau mengurangi respon terhadap rangsangan-rangsangan fisikal, dan sebaliknya memberikan responnya secara lebih besar kepada rangsangan - rangsangan ‘irasional’ seperti agama. Inilah yang tidak bisa dilakukan oleh hewan, tumbuhan dan benda-benda lain, dan oleh karenanya manusia tidak bisa diteliti dengan cara-cara penilitian untuk benda-

benda itu. Hal serupa juga terjadi di tingkat internasional, karena hubungan internasional adalah pucak sosialitas manusia. Semua mahluk imanijatif yang diidentifikasi sebagai aktor internasional seperti negara dan organisasi internasional adalah representasi dari manusia dan 'dihidupkan' juga oleh manusia.

Salah satu konsep kunci konstruktivis untuk memahami fenomena hubungan internasional adalah identitas. Konsep identitas sebenarnya dipinjam dari sosiologi dan psikologi sosial. Berdasarkan kedua disiplin itu, identitas bisa dipahami melalui dua pemaknaan. *Pertama*, identitas sebagai kategori 'sosial' yaitu atribut atau karakteristik yang membedakannya dengan yang lain. Konsepsi ini mengimplikasikan identitas sebagai sesuatu yang terkonstruk dalam proses interaksi dengan pihak lain (*significant other*). Jadi dibutuhkan intersubyektivitas untuk memberi makna siapa 'aku/kami' dan siapa 'kamu/mereka'. Bagaimana kelompok atau individu-individu di luar aktor berpengaruh terhadap bagaimana cara aktor memandang dirinya dan di luar dirinya tidak bisa dimengerti tanpa memahami konteks sosial yang lebih luas dimana aktor yang bersangkutan berada (Ellemers dkk, 2002: 164-165). Identitas kategori ini relatif plastis atau mudah berubah tergantung proses pemaknaan dalam sebuah proses interaksi. Contohnya identitas sebagai negara 'demokratis', 'pembela HAM', 'stabilisator', dan lainlain. Untuk mendefinsikan diri sebagai negara 'pembela HAM', Amerika memerlukan eksistensi negara 'pelanggar HAM'. *Kedua*, identitas sebagai kategori 'personal' yaitu atribut atau karakteristik yang melekat dalam diri aktor yang keberadaannya muncul tanpa perlu proses pembedaan dengan yang lain. Definisi kedua ini

mengandaikan identitas sebagai sesuatu yang disadari sendiri (*self-awareness*) oleh aktor bersangkutan tanpa perlu intersubyektivitas. Identitas personal memandang aktor sebagai pribadi yang unik yang membedakannya dengan pribadi lain.

Aktor melakukan tindakan atas dasar kehendak dan tujuannya sendiri tanpa melihat posisi atau kedudukannya dalam konteks sosial, Stets dan Burke 2000: 228). Identitas kategori ini relatif stabil karena atribut yang dimiliki melekat sejak awal. Contohnya adalah identitas etnis, agama, budaya, dan sebagainya. Untuk mendefinisikan dirinya sebagai 'negara muslim' Indonesia tidak perlu membedakan dirinya dengan negara yang 'bukan muslim' karena secara intrinsik Indonesia memang penduduknya mayoritas beragama Islam. Meskipun berbeda secara konseptual, kedua konsep pada intinya sama bahwa identitas adalah atribut atau karakteristik yang melekat pada diri aktor yang berfungsi untuk membedakan atau mengidentifikasi diri dengan pihak lain (Mead, 1934: 173-178)

Setidaknya terdapat dua gagasan kunci Konstruktivisme yang relevan bagi studi HI:

1. *pertama,* keyakinan bahwa struktur-struktur yang menyatukan umat manusia lebih ditentukan oleh *shared ideas* (gagasan-gagasan yang diyakini bersama) dari pada kekuatan material. Keyakinian tersebut merepresentasikan perspektif idealis yang pernah mendominasi disiplin HI terutama sebelum Perang Dunia ke II.
2. *kedua,* kepercayaan bahwa identitas dan kepentingan aktor-aktor lebih ditentukan oleh *shared ideas* dari pada faktorfaktor alam. Artinya tindakan

> setiap aktor tidak semata-mata ditenukan oleh motif, alasan dan kepentingan mereka akan tetapi lebih dibentuk oleh interaksi antar individu dalam lingkungan di sekitarnya (struktur sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya). Dengan demikian perspektif ini mewakili aliran Strukturalisme dalam teori Konstruktivisme.(Steffano Guzzini 2006 : 175-176)

Dengan kata lain, teoritisi Konstruktivisme berkeyakinan, bahwa dunia sosial bukanlah sesuatu yang *given*, dunia sosial bukan sesuatu di "luar sana" yang hukum-hukumnya dapat ditemukan melalui penelitian ilmiah dan dijelaskan melalui teori ilmiah, seperti yang dikemukakan kaum Behavioralisme dan Positivisme. Melainkan dunia sosial merupakan wilayah intersubjektif. Konsep Konstruktivisme tentang struktur sosial sebagaimana dijelaskan oleh Alexander Wend (1992), terdiri dari sedikitnya tiga komponen: (1) pengetahuan bersama; (2) sumberdaya material; dan (3) praktik. Pengetahuan bersama merupakan dimensi pengetahuan yang terkontruksi oleh interaksi di antara banyak aktor. Ia bersifat intersubjektif dan sangat dinamis. Pengetahuan bersama itu kemudian menjadi variabel yang turut menata, mengatur, dan menjadi acuan bagi aktor-aktor dalam bertingkah laku. Sementara di sisi lain sumber daya material merupakan fakta empirik yang lepas sama sekali dari pengetahuan kolekif tersebut. Ketiga adalah praktik atau tingkah laku aktor yang sejatinya merupakan variabel yang dipengaruhi oleh kontruksi pengetahuan yang mereka bangun sendiri secara kolektif dan bersifat sangat dinamis. Berbeda dengan perspektif arus utama seperti Realisme, Liberalisme maupun Strukturalisme yang memberikan penekanan kuat

pada para pelaku dan aneka pola hubungan di antara mereka, Konstruktivisme justru melihat pada beragam dimensi yang bersifat konstruksi gagasan sebagai akibat interaksi di antara para aktor, seperti wacana, opini, isu, nilai, identitas, norma, budaya dan lain sebagainya. Para teoritisi Konstruktivisme meyakini aneka konstruksi gagasan kolektif tersebut merupakan produk dari berbagai interaksi dari aktor-aktor dalam ranah empirik. Bangunan gagasan tersebut bersifat sangat dinamis dan menjadi variabel yang berimplikasi pada cara aktor melihat diri dan lingkungannya. Pada konteks ini aktor-aktor dalam ranah hubungan internasional menentukan identitasnya, kepentingannya dan akhirnya tindakan aktor tersebut Andrew Bradley Phillips secara lebih tegas menulis : *"…….,constructivists' focus on the role played by ideational factors…".* Hakekat manusia menurut konsepsi Konstruktivisme lebih bersifat bebas dan terhormat karena dapat menolak atau menerima sistem internasional, membentuk kembali model relasi yang saling menguntungkan, atau yang diinginkan berdasarkan peraturan, strukturasi dan *verstehen* dalam *speech acts* (Andrew Bradley,2007;68).

Dilema keamanan *(security dilemma)* misalnya, dalam kacamata Konstruktivisme bukanlah pola yang diinduksikan dari fakta empirik. Ia justru sebaliknya merupakan gagasan yang dikontruksi dari interaksi di antara banyak aktor. Bila dilema keamanan diinduksikan dengan metodologi Positivisme dari fakta empirik seharusnya Amerika tidak hanya terancam oleh nuklir Korea Utara dan Iran, namun juga oleh nuklir Israel maupun Inggris. Faktanya Amerika hanya terancam oleh Korea Utara dan Iran namun tidak oleh Inggris dan Israel, ini

adalah indikasi yang menunjukkan betapa dilema keamanan merupakan kontruksi gagasan bukan induksi dari fakta empirik. Hal yang sama juga berlaku pada konsep *balance of power*, ia juga bukan seperti yang dikatakan para ilmuan positivis sebagai pola yang diinduksikan dari fakta empirik, namun *balance of power* tidak lebih dari sekedar kesepakatan di antara banyak aktor yang kemudian menjadi variabel yang berkorelasi positif dengan tingkah laku negara-negara sehingga tidak berperang.(Andrew Bradley 2007;80).

Kenapa negara-negara Eropa berintegrasi?. Tidak lain karena pemaknaan kolektif mereka (negara - negara Eropa) terhadap wacana adanya ancaman yang hanya dapat dihindari dengan berintegrasi. Andai saja ada pemaknaan lain yang mewacana selain integrasi, maka mereka tentu akan merespon dengan cara yang berbeda pula. Contoh yang lain adalah fenomena perang, perang dalam kacamata Konstruktivisme dilihat sebagai temuan dari interaksi anatar manusia tentang metode dalam berhubungan dengan pelaku lain ketika berselisih. Manusia bisa saja, sebenarnya, menemukan metode selain perang dalam memecahkan perselisian, katakanlah misalnya berpesta. Andai saja pesta, dulu yang ditemukan untuk menyelesaikan perselisihan di antara berbagai pihak berselisih maka bukan mustahil bila di dunia akan terjadi banyak sekali pesta(Andrew Bradley 2007;74).

Demikian Kontruktivisme menjelaskan realita hubungan internasional yang sejatinya mereka anggap sebagai *share of ideas* dari para pelaku dalam ranah empiris dunia ini. Aktor-aktor dalam memilih tindakannya tidak dipengaruhi oleh kepentingan mereka namun oleh gagasan yang mereka bangun sendiri, karena

sejatinya kepentingan pun bila diruntut ke belakang akan sampai pada gagasan. (Steffano Guzzini 2006 : 200).

Ilmu Hubungan Internasional merupakan disiplin ilmu yang terus tumbuh dan mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Permasalahan dan isu-isu yang ada dalam hubungan internasional saat ini sudah semakin kompleks sehingga untuk dapat memahami dan menganalisa permasalahan mengenai isu-isu yang ada tidak cukup hanya dikaji melalui perspektif-perspektif tradisonal, oleh karena itu perlu adanya perspektif-perspektif alternatif untuk menyempurnakan teori-teori yang kurang dijelaskan dalam perspektif tradisional. Salah satu perspektif alternatif dalam Hubungan Internasional adalah perspektif konstruktivisme sosial. Konstruktivisme muncul sebagai perspektif *via media* yaitu suatu perspektif yang menjembatani pemikiran antara rasionalisme dan pendekatan radikal, yakni reflektivisme dan relativisme. Konstruktivisme menyediakan beragam pendekatan yang belum pernah ditawarkan oleh perspektif-perspektif sebelumnya. Prespektif ini mengkritisi dan mencari solusi atas persoalan hubungan antar negara, sehingga dapat dijadikan sebagai standar dalam menganalisa politik internasional (Zehfuss, 2002: 3).

Konstruktivisme diusulkan oleh seorang tokoh yang bernama Alexander Wendth dalam karyanya yang berjudul '*Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics'*. Para kritikus konstruktivis sosial menawarkan penjelasan mengenai pembentukan identitas. Identitas nasional dianggap sebagai isu besar yang menarik dan penting untuk dibahas dalam Hubungan Internasional dengan tokoh Alexander Wendth menentang asumsi

neorealisme dan neoliberalisme bahwa identitas dan kepentingan merupakan sesuatu yang *given* atau suatu hal yang memang ditakdirkan dan tidak dapat berubah atau statis. Konstruktivisme melihat bahwa identitas dan komunitas bukanlah sebuah *given,* melainkan suatu hal yang dibentuk, dikembangkan dan dapat berubah dalam suatu interaksi (Zehfuss, 2002: 38).

Perspektif konstruktivisme muncul pada akhir tahun 1990-an hingga pada awal 2000-an, tepatnya pada berakhirnya Perang Dingin menjadi awal munculnya pemikiran konstruktivisme sosial. Konstruktivisme sosial merupakan salah satu perspektif alternative dalam Hubungan Internasional yang berasal dari ilmu Sosiologi di bidang institusionalisme (Weber, 2005: 62). Berakhirnya Perang Dingin menjadi awal kemunculan pemikiran konstuktivisme sosial, di mana kaum melihat bahwa aktor dan sistem yang ada di dunia pada dasarnya merupakan hasil dari konstruksi manusia. Berbeda dari perspektif tradisional, seperti realisme yang memandang bahwa sifat dari sistem international membentuk perilaku negara. Sementara liberalisme yang memandang bahwa perilaku dari aktor membentuk sifat sistem internasional.

Para konstrutivis mengakui bahwa negara tetap merupakan aktor sentral dalam hubungan internasional, karena negara memiliki pengaruh yang kuat dalam struktur sosial yang ada (Zehfuss, 2002: 40). Perspektif ini memiliki fokus pada proses yang dilakukan oleh aktor dan berkaitan dengan makna. Selain itu, perspektif ini memiliki fokus pada konsep identitas. Para kritikus konstruktivisme memandang keberadaan identitas sangatlah penting, karena identitas terbentuk oleh adanya proses interaksi yang berlangsung secara intens (Zehfuss, 2002: 42).

Konstruktivisme beranggapan bahwa identitas politik mempengaruhi tindakan suatu negara, contoh, Iran pada masa di bawah pemimpin Syah Reza Pahlevi, di mana pada saat itu Iran bergantung pada Amerika Serikat, namun hal tersebut bergeser ketika Iran berada di bawah kekuasan Mahmoud Ahmadinejad. Mahmoud Ahmadinejad merupakan tokoh revolusioner yang menentang Amerika Serikat. Berdasarkan dari contoh tersebut dapat terlihat jelas perbedaan identitas politik mempengaruhi tindakan suatu negara.

Perspektif konstruktivisme berusaha memahami motif dan peran aktor dalam sistem politik internasional. Para teoritis konstruktivis berusaha menjelaskan tatanan negara baik dalam hal yang *tangible* dan *intangible,* di mana kaum neorealis hanya dapat menjelasan permasalahan yang bersifat *macro* dan *tangible*, belum dapat menjelaskan isu-isu yang bersifat *micro* dan *intangible*, sementara kaum konstruktivis fokus pada permasalahan yang bersifat*micro* dan *intangible*. Contoh, interaksi antara Amerika Serikat dengan Afganistan, di mana pada isu ini, kaum realis beranggapan bahwa kepentingan nasional Amerika terhadap Afganistan hanyalah sebatas material saja, yaitu hanya fokus pada minyak. Sementara konstruktivisme menyatakan bahwa kepentingan Amerika Serikat tidak hanya menyangkut persoalan minyak, terdapat kepentingan lain yang diinginkan oleh Amerika Serikat yaitu kepentingan jangka panjang seperti penyebaran ideologi Amerika Serikat.

Terdapat empat tema utama dalam perspektif konstruktivisme. Tema yang pertama adalah negara dan *power*. Politik internasional tidak cukup dipahami

melalui analisis sistem internasional. Hal tersebut bertentangan dengan asumsi kaum neorealis yang memandang sistem internasional yang bersifat mekanistik. Perspektif konstruktivis sosial tidak memandang adanya universal mengenai hal tersebut. Sebaliknya, kaum konstuktivis menyatakan bahwa perilaku negara tersosialisasikan ke dalam lembaga-lembaga politik internasional. Kaum konstruktivis beranggapan bahwa *power* dan *interest* bukanlah paramater pengatur politik internasional, melainkan norma-norma fundamental yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai pengatur politik internasional (Steans dkk 2010: 192). Tema kedua adalah Institusi dan tatanan dunia. Dalam tema ini, perspektif konstruktivisme lebih berfokus pada masyarakat internasional, anarki dan Rezim Internasional dibanding mengenai sistem internasional. Perspektif konstrutivisme juga memandang peran institusi sebagai aktor penting dalam sistem politik internasional (Steans dkk, 2010: 192-96). Agen dan struktur saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut tersebut dikarenakan struktur dapat menghubungkan antara identitas dan kepentingan aktor (Wardhani,2016:92). Mengenai anarki menurut pandangan konstruktivisme memandang bahwa, interaksi antar negara yang membentuk anarki. Oleh sebab itu anarki yang dimaksud oleh konstruktivis bersifat konteks-spesifik. Salah satu cara di mana hubungan internasional menjadi lebih teratur yaitu perlu adanya rezim internasional. Rezim disini biasanya didefinisikan sebagai norma, aturan, prinsip dan prosedur yang telah disepakati bersama (Steans dkk, 2010: 192-96).

Tema ketiga adalah identitas dan komunitas. Bagi konstruktivis sosial, identitas merupakan konsep penting karena tidak hanya berfungsi untuk

menjelaskan kepentingan nasional. Identitas juga berisfat penting dalam pembuatan kebijakan kebijakan, dan tidak hanya melalui definisi kepentingan. Identitas disini diannggap sebagai basis yang menentukan perilaku sebuah negara (Steans dkk, 2010: 196-97). Tema yang terakhir adalah perdamaian dan keamanan. Kontruktivisme mengkaji budaya keamanan yang kemudian direproduksi oleh kebijakan kemanan. Kaum konstruksivis sosial percaya akan adanya keterkaitan antara identitas, norma, dan institusi dalam proses pembuatan *security policy* atau kebijakan kemananan. Keamanan sebenarnya hanyalah sebuah konstruksi yang dibangun melalui rasa kebersamaan dalam perdamaian antar satu sama lain yang dapat membentuk komunitas keamananan tersebut (Steans dkk, 2010:199-200).

Konstruktivisme sosial sebagai sebuah perspektif tidak lepas dari kritik. Perspektif konstruktivisme dikritik oleh rasionalis dan reflektivis, kedua perspektif tersebut beranggapan bahwa secara garis besar perspektif konstruktivisme tidak konsisten dan tidak cukup radikal dalam isu yang diperdebatkan (Steans dkk, 2001: 201). Sebuah kritik lebih jauh ditujukan pada konstruktivisme adalah gagasan mengenai identitas atau norma sebagai penjelas merupakan faktor bermasalah, menurut kaum rasionalis, kedua hal tersebut tidak dapat langsung diamati, sehingga ide-ide konstruktivisme tidak dapat dimasukkan ke dalam kerangka pemikiran kaum rasionalis. Kemudian, menurut reflektivisme, konstruktivisme sosial tidak memiliki perbedaan dengan perspektif lain karena masih *state-centric*. Kritik yang datang dari rasionalis dan reflektifis adalah

perspektif konstrutivisme dianggap tidak tegas dalam menentukan posisi ketika mengkaji permasalahan hubungan internasional (Steans dkk, 2010: 201).

2.1.3 Hubungan Bilateral

Konsep kerjasama bilateral yang dilakukan antar negara menjadi hal yang sangat penting dalam studi hubungan internasional. Kebanyakan kerjasama internasional dilakukan secara bilateral, misalnya perjanjian politik, ekonomi, pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan antar negara. Hubungan bilateral hanya melibatkan dua negara, Dalam hal ini terdapat dua aktor yang berperan yang disebut dengan negara. Aktor disini bukan hanya sebatas pemerintah yang mewakili negara namun juga dapat berupa instansi atau pihak swasta yang berada dalam naungan sebuah negara.(Ikeora,2018;71)

Dalam konstruktivisme, pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa hubungan bilateral adalah ide-ide dan norma-norma yang membentuk asumsi tentang sifat inheren dari sistem internasional. Meminjam dari pemahaman sosiologi, konstruktivis berpendapat bahwa cara orang memahami realitas itu penting. Persepsi membentuk bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dan dengan dunia mereka, dan oleh karena itu para ilmuwan sosial harus menganggap mereka sebagai faktor motivasi yang kuat untuk menjalin hubungan bilateral. Adapun norma – norma dan ide – ide tersebut seperti *identity*, konstruktivis berpendapat negara dapat menjalin hubungan bilateral yang baik dikarenakan berbagi identitas. Tanpa identitas yang dibagikan itu, mereka tidak dapat berhubungan satu sama lain.(Guzzini, 2006 ;123)

2.1.3.1 Normalisasi Hubungan Bilateral

Normalisasi adalah serangkaian prinsip berbasis nilai. Adapun pengertian Normalisasi menurut KBBI yakni "tindakan menjadikan normal (biasa) kembali, tindakan mengembalikan pada keadaan, hubungan, dan sebagainya yang biasa atau normal. Normalisasi dipandang sebagai suatu proses pengakuan kebutuhan dan pengenalan langkah-langkah untuk mengurangi ketegangan atau perselisihan; mempromosikan peningkatan suatu hubungan; dan mengisolasi, berisi atau menyelesaikan, seluruhnya atau sebagian sumber utama perselisihan atau ketegangan Normalisasi terjadi dikarenakan adanya suatu kepentingan yang mendesak pada para pihak yang bersangkutan.(https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/NORMALISASI di akses pada 28 Juli 2018)

Dalam Normalisasi, konstruktivisme mendefinisikan bahwa identitas membentuk kepentingan negara. Jadi, bagaimana suatu negara akan bertindak dan apa yang akan diinginkan tergantung pada identitasnya. Akibatnya, minat menentukan hubungan seperti apa yang akan dimiliki negara-negara dengan negara lain. Dalam hubungan negara semuanya didasarkan pada saling pengertian. Bagaimana negara memandang diri mereka sendiri dan satu sama lain menentukan hubungan mereka untuk melakukan normalisasi.(Behravesh.2011;55)

2.1.5 Politik Luar Negeri

Dalam konstruktivisme, politik luar negeri berangkat dari asumsi bahwa dunia dan isinya hanyalah merupakan hasil dari konstruksi sosial rekaan manusia itu sendiri (Checkel 2008,72). Analisis melalui perspektif konstruktivisme menilai politik luar negeri sebagai hasil dari keberadaan birokrasi, proses pembuatan

keputusan (*decision-making*), dan pengaruh dari masyarakat internasional. Konstruktivisme dalam hubungan internasional sendiri muncul sebagai jembatan antara teori-teori normatif rasionalis dengan teori-teori reflektivis. Fokus dari permikiran ini ada pada kepentingan-kepentingan serta ide-ide yang saling memengaruhi satu sama lain seperti norma, budaya, dan institusi-institusi dalam proses politik luar negeri. Politik luar negeri menggunakan perspektif konstruktivisme lebih cenderung pada penjelasan yang benar-benar dibutuhkan dalam proses analisis mengingat mekanismenya melibatkan motif kepentingan birokrasi dan negara dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga biasa disebut sebagai analisis behavioralistik

Konstruktivisme yang memandang setiap fakta hanyalah fakta apabila tidak dibingkai dengan teori, dan teori merupakan hal yang di dalamnya selalu mengandung pandangan seseorang terhadap sesuatu yang diresponinya. Konstruktivisme pulalah yang pada akhirnya menghadirkan presepsi atas "kawan" dan "lawan" dalam hubungan internasional. Sehingga, analisis politik luar negeri dapat dilakukan dengan mengetahui presepsi negara terhadap kawan dan lawannya. Selain itu dalam pandangan penulis, Konstruktivisme juga memberikan sumbangsih bahwa ketika pengambilan keputusan pun tidak dapat lepas dari intersubyektivitas pemimpin dalam memandang kawan atau lawannya.(Guzzini, 2006 ;204)

2.1.6 Diplomasi

Konstruktivisme lahir sebagai penengah perdebatan ketiga dalam ilmu Hubungan Internasional. Konstruktivis muncul di akhir tahun 80an sebagai

penengah untuk meredakan perdebatan ini. Konstruktivisme hadir dengan ketertarikan utamanya pada bagaimana obyek dan praktik kehidupan social dikonstruksi dan terutama obyek dan praktik yang dianggap oleh peneliti dan masyarakat sebagai hal yang alamiah *(given)*. Konstruktivis menolak logika konsekuensi *(logic of consequences)* dan menekankan logika kepantasan *(logic of appropriateness).* Konstruktivis meyakini bahwa pilihan tindakan aktor tidak selalu didasarkan atas logika konsekuensi yang menekankan perhitungan matematis atas kepentingan yang bersifat materi. Pertimbangan kepantasan dalam mengambil keputusan untuk bertindak merupakan pengaruh utama terhadap aktor. Hal-hal yang bersifat non material atau ideasional dan norma yang saling dibagi dalam pergaulan internasional menjadi landasan bagi tindakan aktor. Ketiga, Konstruktivis menolak pembentukan klaim pengetahuan sebagai hukum obyektif yang dipergunakan untuk kebutuhan melakukan prediksi. Bagi konstruktivis, klaim terhadap pengetahuan hanya dapat dilakukan secara spesifik dan tidak semata-mata mengabdi kepada kepentingan untuk dapat melakukan prediksi. Merujuk pada asumsi dasar tersebut maka, bukan kepentingan nasional yang menjadi tujuan diplomasi melainkan kesadaran atas adanya perbedanaan identitas negara bagi dasar pembangunan hubungan antar negara. Kesadaran dan pemahaman merupakan. faktor penting yang terkait dengan kedirian seseorang dan hubungan seseorang dengan orang lain, dan komunikasi memiliki peran utama dalam hal ini (Steans dan Pettiford, 2009: 229).

Tujuan dari diplomasi bagi Konstruktivis dengan demikian tidak terletak pada kepentingan nasional semata karena ia percaya kepentingan nasional akan

selalu dapat berubah sejalan dengan berubahnya identitas negara yang terjadi karena interaksi antar negara. Diplomasi kemudian lebih dipahami sebagai interaksi aktor dalam menyampaikan pesan kepada aktor yang lain dan atau membentuk makna tertentu dalam benak mereka. Diplomasi juga dipahami sebagai upaya untuk mempengaruhi norma internasional melalui wacana publik (Juyan, 2006;30) menumbuhkan kesadaran publik dan akhirnya pembangunan hubungan baik antar negara. Melalui pendekatan semacam ini, diplomasi tidak lagi sebatas menyoal state branding yang dikehendaki secara sepihak oleh elit. Diplomasi bukan lagi sebatas upaya-upaya meyakinkan publik negara lain atas satu citra tertentu melainkan upaya setiap agen dalam mempengaruhi relasi antar negara. Jika kesadaran berbangsa dan identitas nasional tersemat dengan kuat maka diplomasi akan menjadi sebuah relasi positif dalam menjamin keseluruhan dinamika hubungan antar negara. Namun sebaliknya jika kesadaran berbangsa lemah dan identitas nasional kabur, maka diplomasi akan menjadi sebuah relasi negatif dalam mengelola persoalan antar negara (Juyan, 2006;35).

2.1.7 Kepentingan Nasional

Konstruktivis mengakui eksistensi fakta material dan ideasonal. Kalau kelompok realis meyakini fakta material sebagai yang utama dan Ide hanya sebagai refleksi dari dunia sosial, konstruktivis meyakini bahwa keduanya memiliki kedudukan ontologis yang setara. Realitas material tidak berarti apa-apa tanpa Ide (pemaknaan). Ide hanya akan sebatas ‘ide’ jika tidak direpresentasikan dalam bentuk huruf atau sistem simbol lainnya, atau jika tidak diwujudkan secara fisikal. Ide tentang sesuatu yang dapat digunakan untuk tukar-

menukar barang hanya dapat berarti setelah manusia mendesain unsur material tertentu sebagai perwujudan ide tersebut, yang kemudian penamaannya disimbolkan dengan kata ‘uang’, dan hal tersebut kemudian diamini oleh orang lain. Dikotomi Ide-materi ini memberikan pengaruh besar saat dimasukkan dalam bejana keilmuan HI pada era *third debate*. Dikotomi ini merubah tema besarbidang studi tersebut dari ‘bagaimana menciptakan perdamaian dunia’ menjadi atas dasar apa negara bertindak, faktor material atau Ide’. Faktor material dapat berupa kepentingan nasional, baik ekonomi maupun keamanan, atau struktur internasional—yang diartikan sebagai distribusi power/ kapabilitas material. Sementara faktor ideasonal berupa identitas, norma, diskursus, sejarah, moral, agama, dan lain-lain. Kendati demikian, dikotomi Ide-materi ini akhirnya tetap mengarah pada isu utama HI tentang perang dan damai. Sebab, mengetahui faktor apa yang mendasari negara-negara bertindak berarti mengetahui mengapa dan bagaimana mereka bisa berperang dan berdamai.(Zehfuss, 2002;124).

Norma membantu mendefinisikan situasi dan oleh karena itu mempengaruhi interaksi antar negara (Zehfuss 2002:47). Sehingga menjelaskan bahwa kepentingan negara didefinisikan dalam konteks nilai dan norma internasional. Peraturan dan norma diikuti sebab sudah terlanjur dianggap alami, benar,dikehendaki, dan sah. Aktor-aktor internasional melakukan tindakan yang mereka anggap pantas untuk dilakukan berdasarkan peraturan dan norma tersebut. Jadi konstruktivisme tidak peduli dengan masalah kepentingan yang menyetir kebijakan negara akan tetapi *apa* yang

membentuk kepentingan dan *bagaimana* kepentingan itu terbentuk (March dan Olsen 2004:35).

2.1.8 Konflik

Konstruktivisme membahas mengenai identitas dan kepentingan aktor aktor yang sudah terkonstruksi secara sosial dan bersamaan dengan hal tersebut muncul pula kepercayaan bahwa perubahan dapat terjadi bahkan dalam praktik dan institusi institusi yang pada awalnya dianggap paling mustahil untuk berubah. Pendekatan ini dapat digunakan untuk lebih memahami kondisi politik global yang terus berubah seperti sekarang ini. Dunia sosial merupakan wilayah intersubjektif; dunia sosial sangat berarti bagi masyarakat yang membuatnya dan hidup di dalamnya, dan yang memahaminya. Dunia sosial dibuat atau dibentuk oleh masyarakat pada waktu dan tempat tertentu. (Zehfuss.2004; 232)

Dalam konflik, terdapat hubungan erat antara agen dan strukturnya. Struktur ini bukan sesuatu yang sudah ada dari dulu melainkan hasil dari pola yang terbentuk dari praktik sosial yang dilakukan berulang ulang oleh aktor / agen agen tersebut. Konsepsi negara mengenai siapa mereka itu dan apa keinginan yang mereka inginkan berkaitan dengan identitas yang diperoleh dari struktur yang dimaknai bersama secara intersubjektif , dan bukannya melalui pembentukan interaksi sosial sebelumnya. Hal ini menunjukkan bagaimana kepentingan suatu negara menjadi acuan utama sehingga negara sedemikian rupa bekerjasama dengan rakyat maupun sturktur-sturktur dalam masyarakat untuk pencapaian hal ini. (Zehfuss.2004; 246)

Perilaku sosial seperti yang terjadi dalam konflik digerakan oleh norma yang memiiki ikatan kuat dengan negara tersebut sehingga norma ini memiliki peranan yang penting dalam menjadi panduan bagi negara dalam menentukan sikap sikap maupun strategi strategi yang akan diambil. Ketidakstabilan dari sistem internasional saat ini menimbulkan analisis yang cukup besar dan tantangan normatif. Realitas sosial merupakan bukan suatu kejadian yang alamiah ada dengan sendirinya dan independen dari interaksi dan sebaliknya tidak bisa juga dilihat sebagai sesuatu yang nihil atau tidak ada dan semata-mata hanya dilihat sebagai refleksi ide-ide manusia (reflektifis). Konstruktivis melihat relitas dunia ini sebagai sesuatu yang didasarkan oleh fakta yang secara materil bisa ditangkap ataupun tidak oleh panca indera namun fakta tersebut tidak menuntun/tidak menentukan bagaimana kita (manusia) melihat realitas sosial. Sebaliknya relitas sosial menurut konstruktivis adalah hasil konstruksi manusia (konstruksi sosial). konstruktivisme merujuk pandangan yang melihat bahwa terdapat suatu pola di mana dunia materi pada dasarnya terbentuk dan dibentuk oleh tindakan dan interaksi manusia yang tergantung pada interpretasi-interpretasi terhadap dunia materi yang tentunya berbeda (antara manusia satu dengan manusia lainnya) karena adanya perbedaan latar belakang secara normatif dan epistemik.(Guzzini.2006;155)

Sehingga konflik dalam pandangan konstruktifis sebagai berikut para konstruktifis secara ontologis konflik di lihat sebagai suatu yang tidak bisa di pandang kebenaran tertinggi, jadi konflik itu apa yang di intepretasikan oleh pengamat sehingga kaum konstruktivis melihat konflik sebagai suatu relativisme

artinya bentuk pemikiran yang menjungjung keterbukaan sekaligus merupakan proses pencarian terhadap kontruksi-kontruksi baru secara terus menerus.dengan cara pandang ini,para konstruktifis melihat realita bercorak plural dan realita itu sendiri berada di pikiran masing-masing orang. (Guzzini.2006;190)

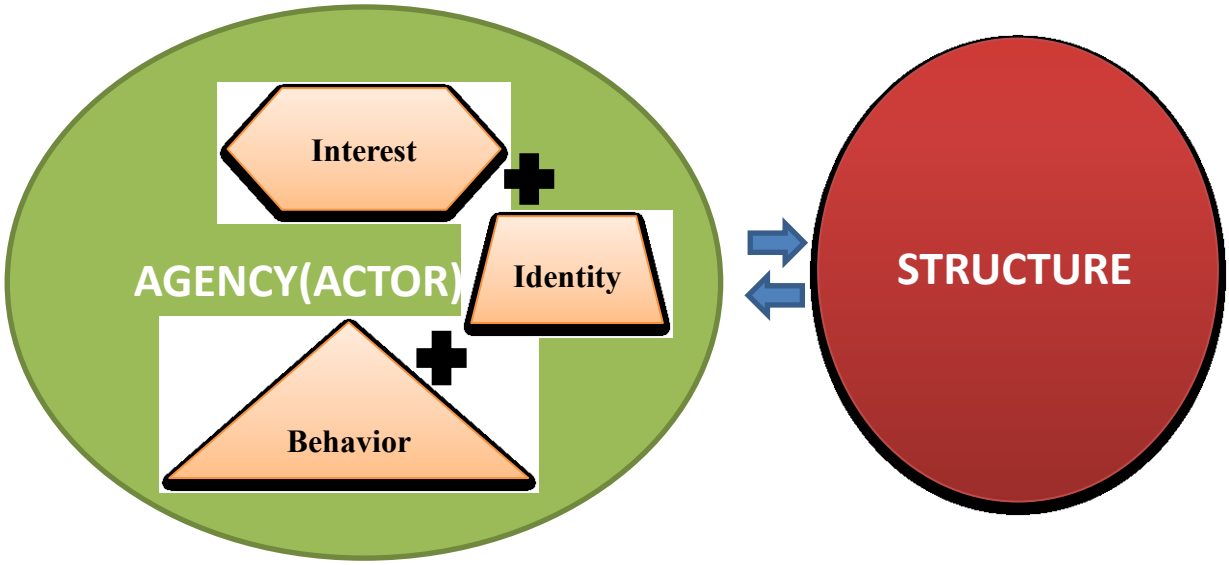
2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah proses penelitian dan pembahasan, penulis mengemukakan dasar pemikiran yang diperoleh dari teori-teori atau pendapat para ahli yang mempunyai kaitan dengan objek penelitian dimana teori-teori dan konsep- konsep para ahli tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk menganalisa permasalahan dengan menyimpulkan hipotesis untuk memahami fenomena Hubungan Internasional, yang diharapkan hasilnya tidak jauh dari sifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Hubungan Internasional (HI) menggunakan berbagai bidang ilmu seperti ekonomi, sejarah, hukum, filsafat, politik, geografi, sosiologi, antropologi, psikologi, studi-studi budaya dalam kajian-kajiannya. Hubungan internasional menjadi penting saat ini karena negara tak dapat hidup sendiri dan memisahkan diri dari dunia internasional. Hubungan Internasional adalah sebuah hubungan yang rumit Mochtar Mas'oed memberikan gambaran mengenai hubungan internasional, sebagai berikut: Hubungan Internsional itu sangat kompleks karena di dalamnya terlibat bangsa- bangsa yang berdaulat, sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit dari pada hubungan kelompok manusia di dalam suatu negara. Hubungan internasional juga sangat kompleks karena setiap segi hubungan itu melibatkan berbagai seni lain yang koordinasinya tidak sederhana. Sebagai sebuah

disiplin ilmu, studi hubungan internasional memiliki banyak teori ataupun perspektif yang kerap digunakan dalam mempelajari itu sendiri. Satu dari yang terbesar merupakan teori konstruktivisme.

Pada penerapan teori konstruktivis mengenai normalisasi hubungan bilateral Turki – Israel pasca konflik Mavi Marmara 2010. Yang dapat dijelaskan adalah mengenai peranan para Agen yang didalam studi kasus ini adalah keberadaan para aktor yang berperan di dalamnya, yaitu Turki dan Israel. Keberadaan para aktor yang berkepentingan tersebut, sekaligus juga berperan sebagai agen yang mempengaruhi keadaan, situasi dan kondisi serta segala aspek yang terkait didalamnya dengan fokus pada normalisasi hubungan bilateral Turki – Israel pasca konflik Mavi Marmara 2010 dikawasan Timur Tengah. Para agen mempunyai pengaruhnya masing – masing terhadap satu sama lain serta mempunyai pengaruh pula terhadap wilayah Timur Tengah yang menjadi struktur dalam pembahasan teori konstruktivis.

Pola dan alur hubungan antara agen dan struktur yang kesemuanya berdasarkan pemahaman dari konstruktivis versi Stefano Guzzini yang dimana struktur dan agen saling mempengaruhi akan dijelaskan pada gambar dibawah ini.

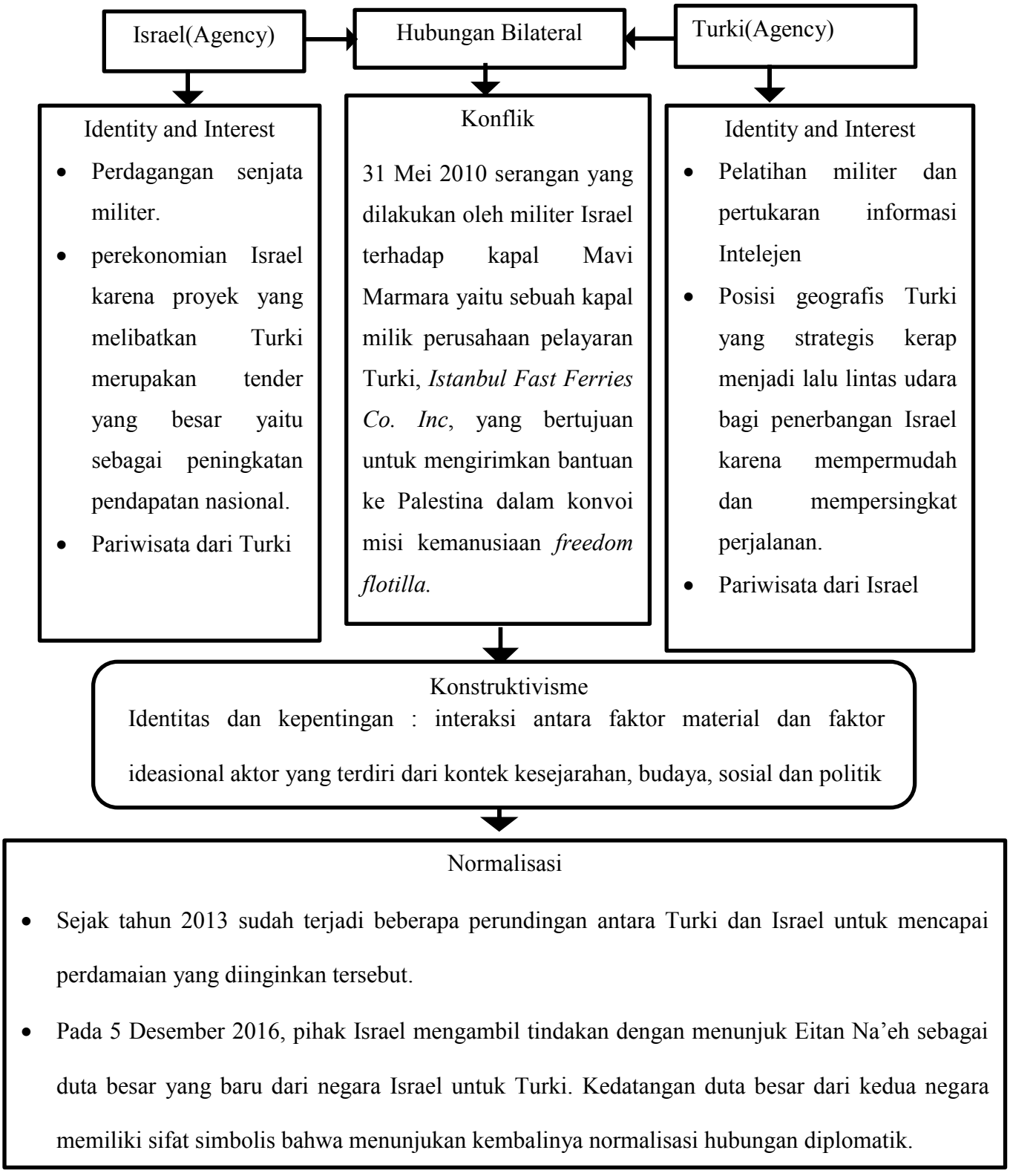


Gambar 2.1 Pola dan Alur Hubungan antara Agen dan Struktur

Hubungan Turki dan Israel diawali dengan pangakuan kedaulatan Turki terhadap negara Israel tahun 1949. Hubungan Turki-Israel berlangsung dengan baik, mengingat kedua negara merupakan negara yang bersebalahan. Kerjasama yang terjalin diantara kedua negara tersebut lebih diprioritaskan dalam bidang keamanan. Namun pada tahun 2010 terjadi suatu tragedy yang mempengaruhi hubungan Turki-Israel. Penyerangan kapal Mavi Marmara yang dilakukan oleh tentara Israel di wilayah kelautan Israel tersebut menyebabkan hilangnya Sembilan nyawa dari pihak Turki. Kapal Mavi Marmara merupakan utusan dari PBB dengan tujuan membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza.

Dalam normalisasinya, Turki dan Israel sama-sama memiliki Identitas dan kepentingan nasional yang diterapkan pada hubungan bilateral yang terjalin sebagai kepentingan untuk menurunkan derajat ancaman konflik yang terjadi melalui interaksi antara faktor material dan faktor ideasional dan sarana konstruksi sosial dengan mensosialisasikan norma dan ide demokrasi yang selama ini dianut oleh Turki dan Israel agar dapat menyamakan pandangan diantara kedua negara. Hal ini dilakukan karena dengan tumbuhnya pandangan yang semakin mirip maka akan dapat menurunkan derajat ancaman konflik yang selama ini menjadi potensi dari ketegangan diantara Turki dan Israel. Konsep penting disini adalah *normalization*, *bilateral relation* dan *identity* yang menjadi inti dari penulisan skripsi ini. Konflik Mavi Marmara 2010 yang menjadi acuan diharapkan proses perdamaiannya dapat di eksplorasi melalui pendekatan – pendekatan dalam studi pengkajian strategis keamanan, karena pada dasarnya konflik yang terjadi tersebut bermula dan berpuncak pada *Arms and Power* yang

digunakan oleh kedua belah pihak. Sebagai salah satu pendekatan teori, kinstruktivis memfokuskan kepada kesadaran dan keinginan manusia (pribadi/*personal*) dan tempatnya (keberadaannya) dalam hubungan internasional. Menurut Stefano Guzzini, dalam Konstruktivis struktur dan agaen akan saling mempengaruhi. Agen mencipatakan struktur dan struktur mencipatakan penafsiaran individu*(meaning)* terhadap kenyataan social. Dimana oleh kaum konstruktivis lebih mementingkan faktor immaterial yaitu struktur hubungan internasional bahwa konstruksi social yang tidak ditentukan oleh aspek material, melainkan oleh penafsiran. Sehingga penafsiran atau ide memunculkan proses pemberian makna terhadap interaksi para aktor dalam lingkup waktu dan situasi tertentu, yang akhirnya akan membentuk *interest* dan identitas aktor. Dalam teori konstruktivisme, menyatakan aspek paling penting dari hubungan internasional adalah konstruksi sosial yang melihat system internasional sebenarnya tidak terbentuk dengan begitu saja, namun merupakan kesadaran intersubjektif diantara manusia, dimana sistem internasional dibentuk oleh ide yang bersifat intersubjektif, bukan sekedar kekuatan material. Konsepsi pemahaman aktor pada objek bergantung kepada pemahaman intersubjektif dalam " Distribusi Pengetahuan". Dan pemahaman aktor dalam pengertian aksi yang diambilnya dibentuk melalui proses interaksi, yang kemudian membentuk identitasnya sebagai dasar dari sebuah kepentingan yang akan mempengaruhi perilaku aktor.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran